



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BUKU ALOKASI DAN RANGKUMAN KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025

2025

Provinsi Aceh

BUKU ALOKASI DAN RANGKUMAN KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 PROVINSI ACEH

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya telah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2025. APBN TA 2025 disusun dengan mempertimbangkan faktor perekonomian global dan dilandaskan pada bauran kebijakan jangka pendek, menengah, dan panjang untuk mendorong pencapaian Visi Indonesia Emas 2045, serta memberikan ruang untuk pelaksanaan program pemerintahan selanjutnya. Hal tersebut diperlukan agar peralihan pemerintahan dapat dilakukan secara lancar pada masa transisi. Kebijakan fiskal yang disusun diharapkan dapat menjawab tantangan, baik struktural maupun siklikal, yang berasal dari global dan domestik.

Pada tahun 2025, dunia diproyeksikan masih akan dihadapkan dengan berlanjutnya ketegangan geopolitik antarnegara yang menimbulkan perang, fragmentasi, proteksionisme, dan disrupsi rantai pasok sehingga menyebabkan harga-harga komoditas pangan, energi, dan pupuk melambung tinggi. Selain itu, suku bunga global yang bertahan tinggi, lemahnya pertumbuhan ekonomi dunia, dan gejolak pasar keuangan turut mempengaruhi risiko global. Indonesia mampu menjaga resiliensi perekonomian, investasi, dan ekspor, lebih baik dibandingkan global. Kita patut bersyukur dan bangga bahwa laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia masih tumbuh sebesar 5,1% di Triwulan ke-3 2024 (y-on-y).

Sebagai tahun pertama pemerintahan baru, tahun 2025 akan menjadi pilar penting untuk menjaga keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui penguatan berbagai program unggulan yang berkesinambungan dari pemerintah sebelumnya. Belanja APBN menjadi instrumen untuk merespon tantangan struktural dan mengamankan dari berbagai guncangan (*shock absorber*), dirancang fleksibel dengan menyediakan ruang fiskal untuk mengantisipasi ketidakpastian, serta mendukung keberlanjutan pembangunan. Akselerasi transformasi ekonomi terus ditingkatkan melalui revitalisasi industri termasuk hilirisasi dan ekosistem *electric vehicles (EV) industry*, penguatan sektor jasa termasuk ekonomi kreatif dan digitalisasi, serta penguatan reformasi struktural untuk meningkatkan *ease of doing business*, dan memperkuat daya saing produk ekspor dan investasi.

Selanjutnya, guna mencapai Visi Indonesia Emas 2045, yaitu menjadi negara maju dan keluar dari jebakan *middle income trap* diperlukan akselerasi pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, APBN harus didorong untuk semakin sehat agar dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kebijakan makro fiskal tahun 2025 diarahkan untuk menjaga keberlanjutan sekaligus penguatan program prioritas dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Dengan demikian, APBN TA 2025 disusun sebagai jangkar untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan kebijakan *countercyclical* yang terukur dan terkendali. Indonesia perlu mengakselerasi

pertumbuhan ekonomi hingga 6 bahkan 8% agar mampu keluar dari *middle income trap* dengan cara menciptakan produktivitas untuk meningkatkan kemakmuran. Indonesia harus bisa membangun daya saing dan produktivitas di pasar dunia, serta menekan korupsi.

Pengelolaan fiskal daerah berpedoman pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) beserta peraturan pelaksanaan turunannya. Sesuai tujuan pembentukannya, UU HKPD diarahkan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah, mendukung sektor-sektor prioritas yang akan dilaksanakan oleh daerah, serta meningkatkan sinergi kebijakan fiskal serta harmonisasi belanja pusat dan daerah dalam rangka mendukung kinerja daerah, mengentaskan kemiskinan, dan memajukan perekonomian daerah. Adapun pokok arah kebijakan fiskal daerah adalah sebagai berikut:

1. Mendorong sinergi dan harmonisasi fiskal pusat dan daerah untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan;
2. Memperkuat kemampuan keuangan daerah guna mendorong peningkatan belanja produktif;
3. Menciptakan kegiatan ekonomi baru (*growth, wellbeing*, dan konvergensi);
4. Perbaikan kualitas belanja APBD;
5. Penguatan *local taxing power*;
6. Pengembangan pembiayaan inovatif; dan
7. Memperbaiki mekanisme penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) guna menjaga kondisi fiskal pemerintah daerah.

Sejalan dengan pokok arah kebijakan fiskal dan dalam rangka menghadapi tantangan strategis di atas, maka kebijakan TKD TA 2025 diarahkan untuk:

1. Meningkatkan kualitas desentralisasi fiskal dengan memperkuat penggunaan *earmarking* Dana Alokasi Umum (DAU), meningkatkan efektivitas Dana Alokasi Khusus (DAK), dan mengoptimalkan Dana Desa, diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah.
2. Mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dimana TKD difokuskan pada sektor-sektor prioritas yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, seperti infrastruktur, sumber daya manusia, dan pariwisata.
3. Menguatkan sinergi kebijakan fiskal dimana kebijakan TKD disinergikan dengan kebijakan fiskal pusat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang lebih luas, seperti pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. Memperluas cakupan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sehingga diharapkan kebijakan TKD dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera.

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, alokasi TKD mengalami kenaikan dari

tahun ke tahun dan telah mencapai 25,8% dari total APBN TA 2025. Pada TA ditetapkan sebesar Rp919,9 triliun, termasuk di dalamnya Dana Desa sebesar Rp71,0 triliun. Rincian alokasi masing-masing jenis Transfer ke Daerah ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2025.

Buku ini diterbitkan dalam rangka memberikan informasi kepada pemerintah daerah mengenai alokasi masing-masing jenis dana TKD tersebut. Saya berharap, buku ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan dan melaksanakan APBD TA 2025. Mengingat pentingnya APBN TA 2025 sebagai pilar penting untuk menjaga keberlanjutan melalui penguatan berbagai program unggulan yang berkesinambungan dari pemerintah sekarang ke pemerintah yang akan datang, maka saya berharap kepada segenap pemerintah daerah untuk segera memanfaatkan dana TKD tersebut sesuai dengan arah kebijakan memperkuat sinergi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah lainnya untuk menjaga "Stabilitas, Inklusivitas, dan Keberlanjutan". Akhir kata, saya mengajak seluruh pihak terkait untuk bekerja sama dalam menyukseskan pelaksanaan kebijakan TKD TA 2025. Mari kita bersama-sama membangun Indonesia yang lebih baik.

Jakarta, 24 Oktober 2024

MENTERI KEUANGAN,



Am SRI MULYANI INDRAWATI *h*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
RANGKUMAN KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH TAHUN 2025	1
REKAPITULASI ALOKASI SE-PROVINSI ACEH	12
1. PROVINSI ACEH	13
2. KAB. ACEH BARAT	14
3. KAB. ACEH BESAR	15
4. KAB. ACEH SELATAN	16
5. KAB. ACEH SINGKIL	17
6. KAB. ACEH TENGAH	18
7. KAB. ACEH TENGGARA	19
8. KAB. ACEH TIMUR	20
9. KAB. ACEH UTARA	21
10. KAB. BIREUEN	22
11. KAB. PIDIE	23
12. KAB. SIMEULUE	24
13. KOTA BANDA ACEH	25
14. KOTA SABANG	26
15. KOTA LANGSA	27
16. KOTA LHOKSEUMAWE	28
17. KAB. GAYO LUES	29
18. KAB. ACEH BARAT DAYA	30
19. KAB. ACEH JAYA	31
20. KAB. NAGAN RAYA	32
21. KAB. ACEH TAMIANG	33
22. KAB. BENER MERIAH	34
23. KAB. PIDIE JAYA	35
24. KOTA SUBULUSSALAM	36
TIM PENYUSUN BUKU	37

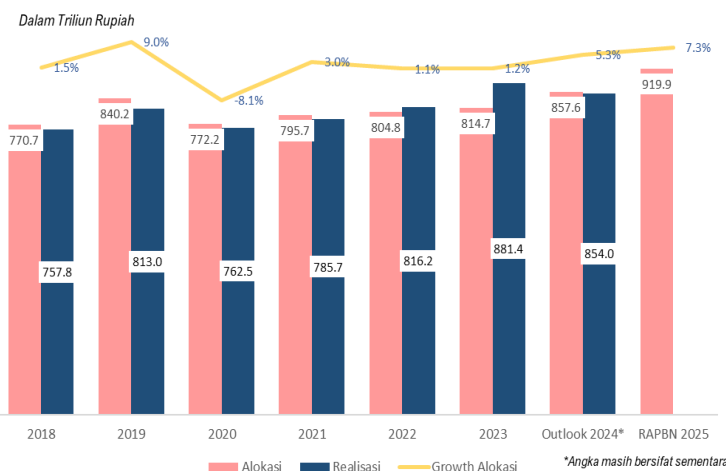


RANGKUMAN KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH TA 2025



TRANSFER KE DAERAH (TKD) TA 2025

Diarahkan untuk Mendorong Belanja Daerah yang Efektif dan Efisien untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di daerah



KEBIJAKAN UMUM TKD 2025

- 1 Sinergi dan harmonisasi fiskal pusat dan daerah.
- 2 Menciptakan kegiatan ekonomi baru (*growth, wellbeing*, dan konvergensi).
- 3 Perbaikan kualitas belanja APBD.
- 4 Penguatan *local taxing power*.
- 5 Pengembangan pembiayaan inovatif.

Peningkatan alokasi TKD antara lain dipengaruhi oleh:

- peningkatan penerimaan negara yang dibagihasilkan melalui DBH,
- dukungan pendanaan untuk PPPK,
- penambahan target sasaran guru penerima dana TPG yang telah bersertifikasi, dan
- dukungan penganggaran untuk prioritas nasional

POSTUR TRANSFER KE DAERAH TA 2025

URAIAN	2023	2024	2024	2025
	Realisasi (Audited)	Perpres 76/2023	Outlook	RUU APBN 2025
1. Dana Bagi Hasil	205,7	143,1	143,1	192,3
2. Dana Alokasi Umum	398,0	427,7	427,7	446,6
- DAU tidak ditentukan penggunaannya	288,9	343,5	343,5	358,6
- DAU ditentukan penggunaannya :	109,1	84,2	84,2	88,0
▪ Penggajian Formasi PPPK	25,7	15,7	15,7	17,3
▪ Pendanaan Kelurahan	1,6	1,7	1,7	1,7
▪ Pendanaan Layanan Publik	81,7	66,8	66,8	69,0
3. Dana Alokasi Khusus	181,4	188,1	184,9	185,2
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	50,3	53,8	51,1	36,9
b. Dana Alokasi Khusus Nonfisik	128,1	133,8	132,7	146,7
c. Hibah ke Daerah	2,9	1,2	1,1	1,6
4. Dana Otonomi Khusus	17,2	18,3	18,3	17,5
5. Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta	1,4	1,4	1,4	1,2
6. Dana Desa	69,9	71,0	70,9	71
7. Insentif Fiskal	7,9	8,0	7,8	6,0
TOTAL TKD	881,5	857,6	854,0	919,9

Penjelasan Pagu Anggaran TKD TA 2025:

DBH naik sebesar Rp 49,2 T karena:

- ✓ Peningkatan proyeksi penerimaan negara
- ✓ Alokasi Kurang Bayar DBH Rp27,8 T.

DAU naik sebesar Rp 18,9 T karena:

- ✓ Dukungan penggajian formasi ASND 2025 dan dukungan penggajian PPPK yang telah diangkat.
- ✓ Diusulkan untuk pergeseran DAU Penggajian PPPK ke DAU Yang tidak ditentukan Penggunaannya

DAK Nonfisik naik sebesar Rp 13,9 T karena:

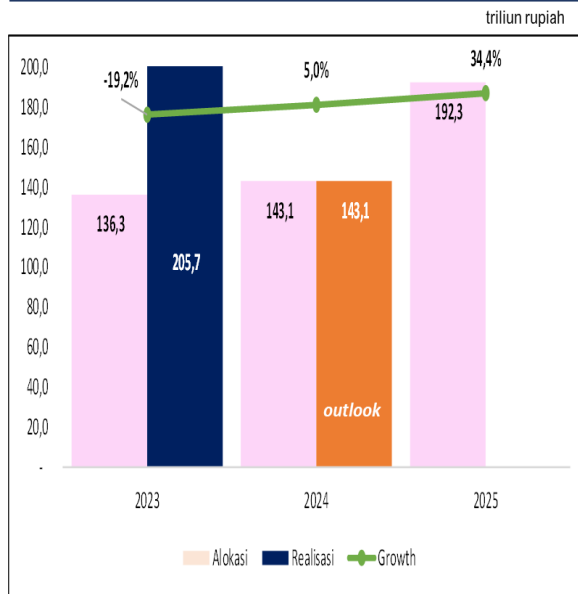
- ✓ Terutama adanya kenaikan sasaran guru bersertifikasi dan perluasan sasaran beberapa jenis DAK Nonfisik.

Beberapa jenis TKD mengalami penurunan karena:

- ✓ Untuk memberi ruang fiskal yang memadai sesuai strategi pelaksanaan prioritas nasional di daerah.

PERKEMBANGAN DAN KEBIJAKAN DANA BAGI HASIL TA 2025

PERKEMBANGAN DBH TA 2023-2025



□ Pada tahun 2023, dilakukan penyelesaian KB DBH s.d. TA 2022 dan penambahan alokasi DBH reguler, sehingga total realisasi DBH menjadi Rp205,7 Triliun.

KEBIJAKAN DBH TA 2025

1. Alokasi DBH yang berkeadilan dan mendorong pelestarian lingkungan serta perubahan iklim.
2. Penyaluran DBH berdasarkan kinerja.
3. Penggunaan DBH *earmarked* untuk sektor prioritas dan penguatan sinergi dengan memanfaatkan teknologi informasi.
4. Transparansi dan akuntabilitas DBH.

POSTUR DANA BAGI HASIL TA 2025

(miliar rupiah)

Jenis DBH	2024 APBN	2025 RAPBN	Selisih	
			Rp	%
Pajak	55.773,9	77.302,8	21.528,9	38,6%
PPh	31.626,6	44.933,1	13.306,5	42,1%
PBB	19.166,6	25.970,8	6.804,2	35,5%
CHT	4.980,8	6.399,0	1.418,2	28,5%
SDA	84.326,0	85.921,0	1.595,0	1,9%
Migas	15.316,0	16.250,9	934,8	6,1%
Minerba	65.079,7	66.402,1	1.322,3	2,0%
Kehutanan	1.464,3	1.104,6	-359,6	-24,6%
Panas Bumi	1.475,8	1.426,6	-49,2	-3,3%
Perikanan	990,2	736,8	-253,3	-25,6%
Lainnya	3.000,0	1.249,9	-1.750,1	-58,3%
Perkebunan Sawit	3.000,0	1.249,9	-1.750,1	-58,3%
Kurang Bayar	0,0	27.808,0	27.808,0	
Total	143.099,9	192.281,7	49.181,8	34,4%

Alokasi DBH dalam RAPBN 2025 sebesar Rp192,3 triliun.

- Alokasi DBH Pajak sebesar Rp77,3 triliun, dengan **alokasi terbesar pada DBH PPh** sebesar Rp44,9 triliun.
- Alokasi DBH SDA sebesar Rp85,9 triliun, dengan **alokasi terbesar pada DBH Mineral dan Batubara** sebesar Rp66,4 triliun.
- Alokasi DBH Perkebunan Sawit sebesar Rp1,3 triliun (4% dari perkiraan realisasi penerimaan Pungutan Ekspor dan Bea Keluar tahun 2024).
- Alokasi minimum DBH Perkebunan Sawit per daerah sebesar Rp500 juta.
- Kurang Bayar DBH dialokasikan sebesar Rp27,8 triliun.

KEBIJAKAN PENGGUNAAN DBH EARMARKED TA 2025

DBH DR

- Optimalisasi penggunaan Sisa DBH DR Kab/Kota sesuai ketentuan perundangan
- Perluasan penggunaan kegiatan strategis lainnya antara lain :
 - ✓ Penguatan Integrated Area Development (IAD)
 - ✓ Pengelolaan kebersihan untuk pelestarian hutan
 - ✓ Pengelolaan jalan sekitar Kawasan
 - ✓ Dukungan pencapaian FOLU Net Sink 2030,
 - ✓ Bantuan jaminan sosial bagi pekerja sektor kehutanan kategori rentan,
 - ✓ Pengelolaan daerah aliran sungai.



DBH CHT

- Digunakan untuk bidang kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dan penegakan hukum.
- Penerima manfaat termasuk:
 - petani tembakau dan buruh tani tembakau.
 - petani cengkeh dan buruh tani cengkeh.
- Fleksibilitas penggunaan
 - Opsi pengalihan anggaran.
 - Penambahan menu kegiatan.

DBH Sawit

- Fokus pada infrastruktur jalan (minimal 80% dari alokasi).
- Mendorong pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan:
 - Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan.
 - Sertifikasi ISPO pekebun.
 - Rehab hutan dan lahan.
- Terdapat nilai alokasi minimum per daerah.

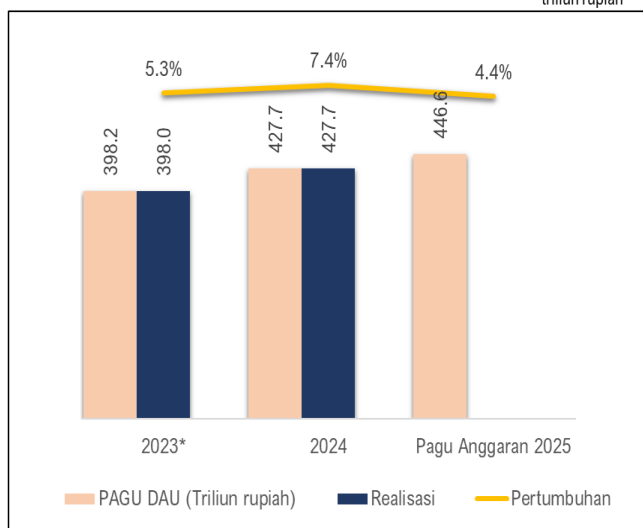


PERKEMBANGAN DAN KEBIJAKAN DAU TA 2025

Pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah sebagai pelaksanaan desentralisasi dan ekualisasi kualitas layanan dasar daerah

PERKEMBANGAN DAU TA 2023-2025

triliun rupiah



*TA. 2023 termasuk Tambahan DAU untuk THR/G13 Guru ASND sebesar Rp2.2 T
 **(Realisasi 2024 = Outlook 2024)

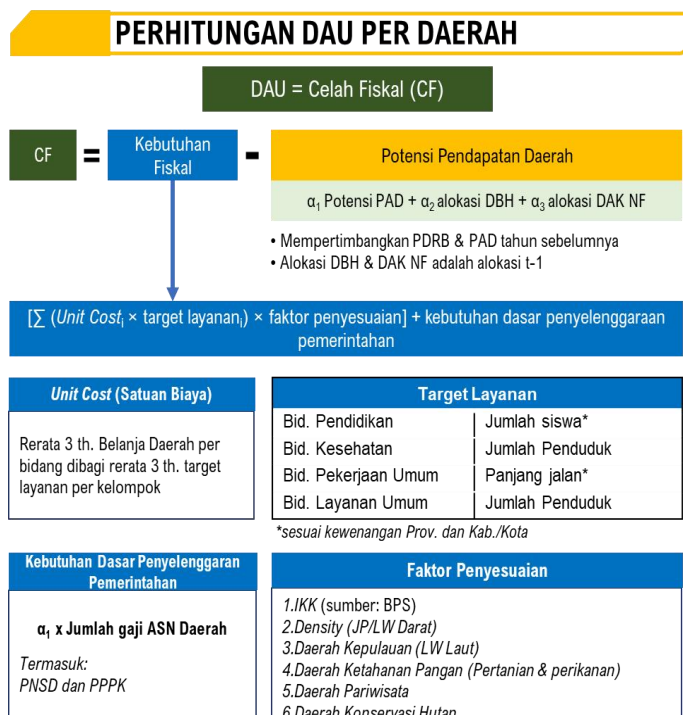
- Pagu DAU tahun 2025 tumbuh sebesar 4,4% dari tahun 2024.

KEBIJAKAN DAU TA 2025

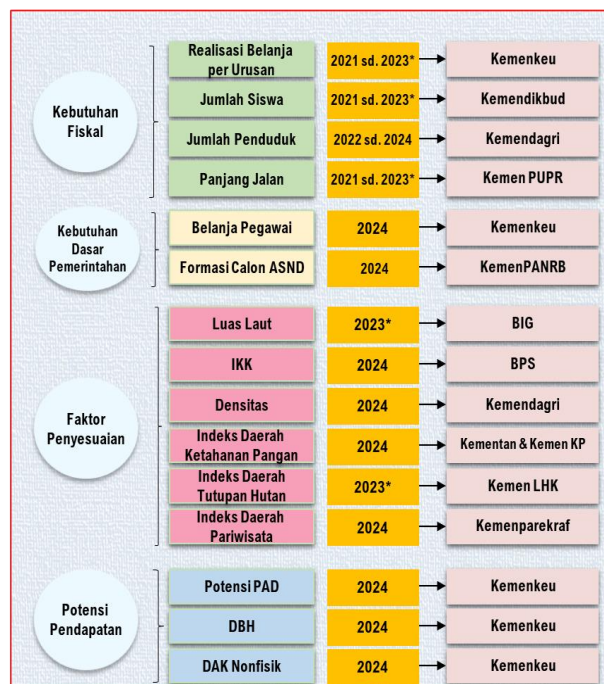
1. Melanjutkan kebijakan pengalokasian DAU diantaranya kebijakan **holdharmless** sampai 2027.
2. Memperkuat penggunaan **earmarking** DAU.
3. Menjaga tingkat **pemerataan keuangan daerah**.
4. Meningkatkan kualitas tata kelola **earmarking** DAU.
5. Melanjutkan kebijakan penyaluran DAU berbasis **kinerja**.

DATA DASAR & FORMULA DAU TA 2025

Kebijakan formula dan data dasar perhitungan sama dengan tahun sebelumnya



DATA DASAR DAU



PAGU & PERKIRAAN PEMBAGIAN JENIS DAU TA 2025

(miliar rupiah)

NO	DAU	ALOKASI TA. 2024	ALOKASI TA. 2025		
			RUU APBN	Usulan Kesepakatan Panja TKD	SELISIH Usulan Kesepakatan Panja TKD dengan RUU APBN
1	DAU Blockgrant	343.527,6	358.617,9	360.515,9	1.898,1
2	DAU Earmarked	84.171,7	88.015,9	86.117,8	(1.898,1)
	DAU PPPK	15.676,7	17.253,2	15.355,14	(1.898,1)
	DAU Kelurahan	1.699,6	1.699,6	1.699,6	-
	DAU Pelayanan Dasar	66.795,4	69.063,1	69.063,1	-
	Total	427.699,3	446.633,8	446.633,8	0,0



Penambahan alokasi DAU diarahkan untuk dukungan kebijakan penggalangan formasi ASDN yang akan diangkat tahun 2025 melalui DAU Earmarked Penggalangan PPPK 2025, dan dukungan penggalangan PPPK eksisting dalam DAU Blockgrant



Penurunan DAU Earmarked dukungan bidang Pendidikan dipengaruhi oleh peningkatan capaian SPM bidang Pendidikan secara nasional.



Kenaikan DAU Earmarked dukungan bidang Kesehatan sebagai tambahan pendanaan untuk mendukung penurunan prevalensi stunting.



Kenaikan DAU Earmarked dukungan bidang Pekerjaan Umum untuk mendukung anggaran infrastruktur sesuai UU HKPD.



Komposisi DAU Earmark tahun 2025 sebesar 19,3% dari total DAU, lebih rendah jika dibandingkan komposisi DAU Earmark tahun 2024 yang sebesar 19,7% dari total DAU

- terdapat pergeseran Jumlah DAU Penggalangan PPPK ke DAU Yang tidak ditentukan Penggunaanya

PAGU & PERKIRAAN PEMBAGIAN JENIS DAU TA 2025

URAIAN	APBN 2024	RAPBN 2025
THEIL (<i>Weighted</i>) Tanpa DAU	0,21344	0,22857
THEIL (<i>Weighted</i>) Dengan DAU	0,14817	0,14257
Penurunan	- 30,6%	- 37,6%

HASIL PENGHITUNGAN ALOKASI DAU TA. 2025:

- Formula penghitungan alokasi dan data dasar DAU TA. 2025 melanjutkan perhitungan DAU TA. 2024 sesuai formula dalam UU 1/2022;
- Dalam alokasi DAU TA. 2025 telah mempertimbangkan **Kebutuhan Daerah terkait pembayaran gaji dan tunjangan melekat PPPK yang diangkat tahun 2024.**
- Hasil perhitungan alokasi DAU TA. 2025 berhasil menurunkan **indeks Theil sebesar – 37,6 %** dari tanpa DAU sebesar 0,22857 menjadi 0,14257 dengan DAU.
- Sebagian alokasi DAU per daerah akan ditentukan penggunaannya, antara lain **untuk penggajian PPPK, pendanaan Kelurahan, dan peningkatan layanan bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pekerjaan Umum.**

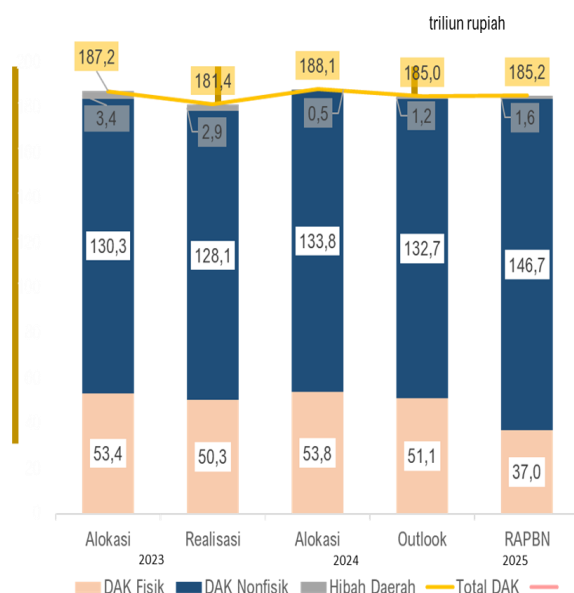
Kebijakan perhitungan alokasi

Penyesuaian alokasi DAU setiap Daerah

- Seluruh Daerah mendapatkan kenaikan alokasi minimal sebesar 2,5% dari alokasi tahun 2024 dan maksimal kenaikan 10% dari alokasi tahun 2024
- Dari penyesuaian tersebut diperoleh hasil:
 - Seluruh Daerah Provinsi mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2024 dengan rata-rata kenaikan sebesar 4.04 %
 - Seluruh Daerah Kabupaten/Kota mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2024 dengan rata-rata kenaikan sebesar 4.05 %

PERKEMBANGAN DAN KEBIJAKAN DAK TA 2025

PERKEMBANGAN DAK TA 2023-2025



- Pagu DAK tahun 2025 turun terutama karena pembangunan/rehabilitasi sekolah/kelas di daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat agar seluruh siswa/guru di Indonesia dapat menikmati standar kualitas pendidikan yang sama

KEBIJAKAN DAK TA 2025

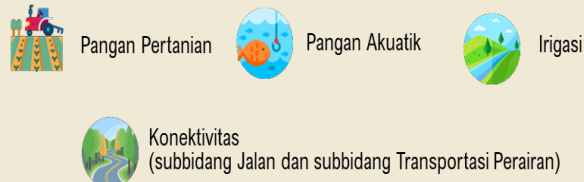
- DAK Fisik:** penyediaan **sarana-prasarana fisik layanan dasar** antara lain bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar.
- DAK Nonfisik:** **pendanaan operasional layanan publik terutama** bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan perempuan dan anak, pertanian, Sentra Industri dan Koperasi UMK.
- Hibah ke Daerah:** mendukung **transportasi perkotaan**, produksi pertanian di dataran tinggi/*upland*, pelestarian lingkungan hidup, serta pemulihan infrastruktur pasca bencana.
- Matching program** dan **sinergi pendanaan.**
- Meningkatkan kualitas pengelolaan DAK.**

DUKUNGAN, TEMA, & BIDANG DAK FISIK TA 2025

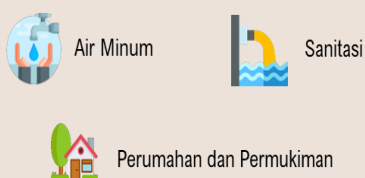
DAK Fisik Layanan Dasar



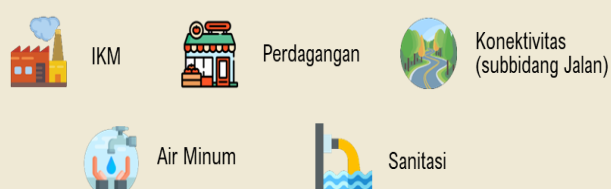
Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional (KPPN)



Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu

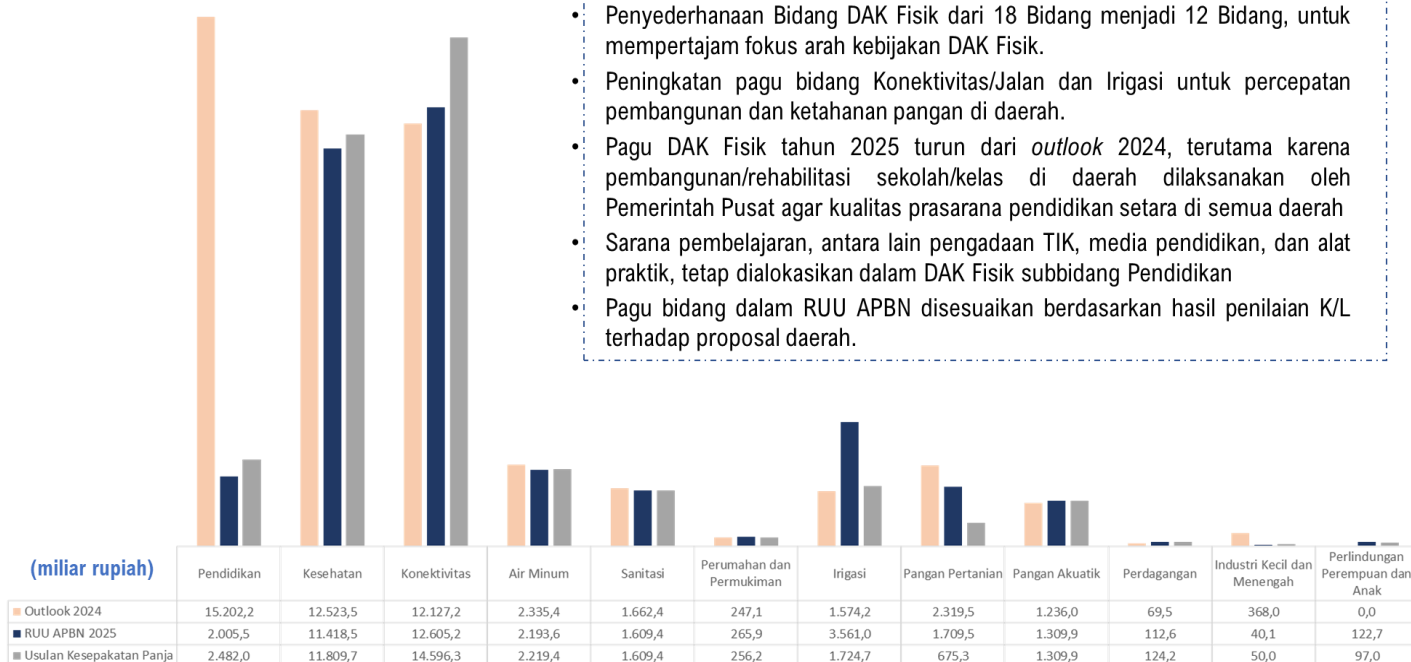


Tematik Pengembangan Ekosistem dan Rantai Pasok Kawasan Industri



POSTUR DAK FISIK TA 2025

- Penyederhanaan Bidang DAK Fisik dari 18 Bidang menjadi 12 Bidang, untuk mempertajam fokus arah kebijakan DAK Fisik.
- Peningkatan pagu bidang Konektivitas/Jalan dan Irigasi untuk percepatan pembangunan dan ketahanan pangan di daerah.
- Pagu DAK Fisik tahun 2025 turun dari *outlook* 2024, terutama karena pembangunan/rehabilitasi sekolah/kelas di daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat agar kualitas prasarana pendidikan setara di semua daerah
- Sarana pembelajaran, antara lain pengadaan TIK, media pendidikan, dan alat praktik, tetap dialokasikan dalam DAK Fisik subbidang Pendidikan
- Pagu bidang dalam RUU APBN disesuaikan berdasarkan hasil penilaian K/L terhadap proposal daerah.



POSTUR DAK FISIK TA 2025

(Miliar Rupiah)

No	Bidang	Outlook 2024	APBN 2025		Selisih
			RUU	2025	
				Usulan/Kesepakatan Panja TKD	
1	2	3	4	5	6=5-4
1	Pendidikan	15.202,2	2.005,5	2.482,0	476,5
2	Kesehatan	12.523,5	11.418,5	11.809,7	391,2
3	Konektivitas (Jalan+Transportasi Perairan)	12.127,2	12.605,2	14.596,3	
	- Sub Bidang Jalan	11.777,6	12.205,2	14.258,7	2.053,4
	- Sub Bidang Transportasi Perairan	349,6	399,9	337,6	-62,3
4	Air Minum	2.335,4	2.193,6	2.219,4	25,8
5	Sanitasi	1.662,4	1.609,4	1.609,4	-
6	Irigasi	1.574,2	3.561,0	1.724,7	-1.836,3
7	Perlindungan Perempuan dan Anak	-	122,7	97,0	-25,7
8	Perumahan dan Permukiman	247,1	265,9	256,2	-9,7
9	Pangan Pertanian	2.319,5	1.709,5	675,3	-1.034,2
10	Kelautan dan Perikanan/Pangan Akuatik	1.236,0	1.309,9	1.309,9	-
11	Perdagangan	69,5	112,6	124,2	11,6
12	Industri Kecil dan Menengah	368,0	40,1	50,0	9,9
	Lainnya	1.477,3	-	-	-
TOTAL DAK FISIK		51.142,5	36.953,9	36.953,9	-

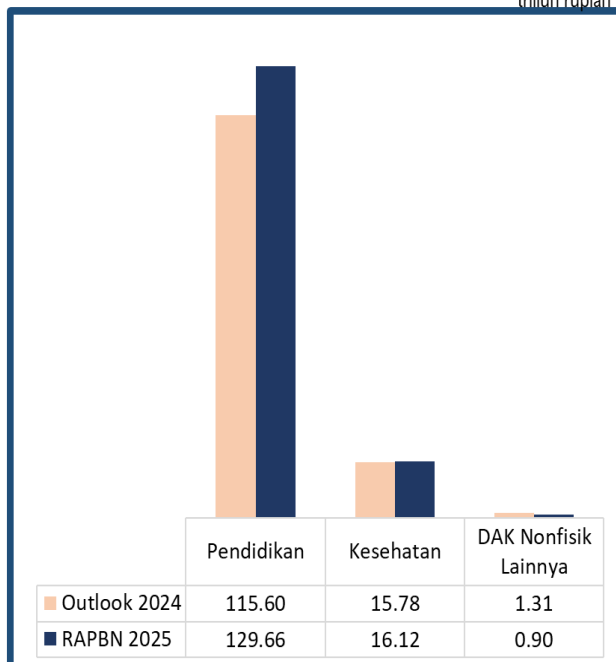
Berdasarkan penilaian atas usulan daerah dilakukan penyesuaian pagu bidang/sub bidang sebagai berikut:

- Pagu bidang irigasi, perumahan permukiman, perlindungan perempuan dan anak, serta pangan pertanian diturunkan sesuai hasil penilaian.
- Sisa pagu hasil penilaian dialihkan sesuai dengan prioritas pembangunan terutama ke bidang Pendidikan (Rp476 M), Kesehatan (Rp391 M), dan Jalan (Rp2,1 T)

POSTUR DAK NONFISIK TA 2025

PERKEMBANGAN DAK NON FISIK TA 2024-2025

triliun rupiah



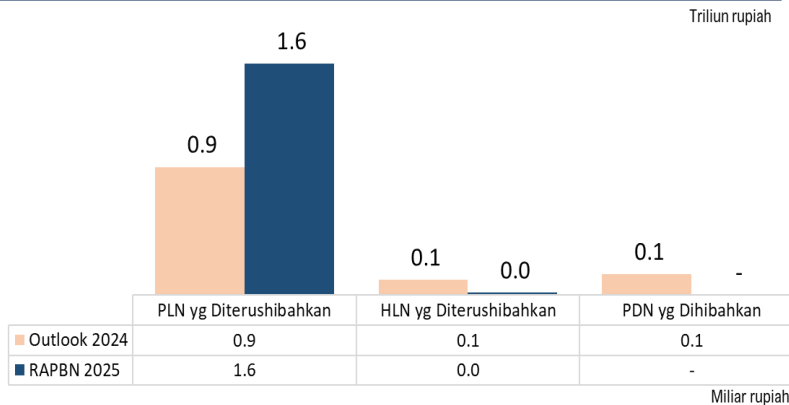
Simplifikasi Jenis dari sebelumnya 16 menjadi 14 jenis, dengan penambahan Pagu DAK Nonfisik karena:

- kenaikan jumlah guru bersertifikat, dan
- kenaikan sasaran terutama BOSP, PK2UMK, dan Pertanian.

No.	Rincian DAK NonFisik	Miliar rupiah	
		Outlook APBN 2024	RAPBN 2025
1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	53.865,6	53.491,7
2	Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD	4.009,1	4.038,7
3	BOP Pendidikan Kesenian	1.618,8	1.741,2
4	Tunjangan Profesi Guru ASND	52.805,5	66.921,6
5	Tambahan Penghasilan Guru ASND	1.219,4	738,2
6	Tunjangan Khusus Guru ASND di Daerah Khusus	1.910,7	2.404,5
7	BOP Museum dan Taman Budaya	170,0	170,0
8	Dana BPP Perpustakaan Daerah	-	150,0
9	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	12.541,8	12.878,7
10	Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	3.239,3	3.239,3
11	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMK	250,0	163,7
12	Dana Pelayanan Kepariwisata	133,3	0,0
13	Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah	62,7	0,0
14	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	129,9	132,0
15	Dana Fasilitas Penanaman Modal	247,4	0,0
16	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	295,7	516,4
	- Subjenis Pangan		88,4
	- Subjenis Pertanian		211,7
	- Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian		216,3
17	Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	194,9	92,0
TOTAL		132.694,1	146.677,9

POSTUR HIBAH DAERAH TA 2025

PERKEMBANGAN HIBAH DAERAH TA 2024-2025



Jenis Hibah kepada Daerah	Outlook 2024	RAPBN 2025 Nota Keuangan	Program/ Kegiatan
A. Pinjaman Luar Negeri yang Diterushibahkan	881,9	1.594,9	Pertanian, Perhubungan, dan Lingkungan Hidup
B. Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan	102,9	14,1	
C. Penerimaan Dalam Negeri yang Diberikan	142,7	0	
Total	1.127,5	1.609,0	

- Pagu Hibah kepada Daerah TA 2025 dialokasikan untuk 3 jenis Hibah kepada Daerah (Hibah MRT, Hibah UPLAND, dan Hibah BioCF ISFL).
- Kenaikan** pagu Hibah kepada Daerah TA 2025 karena adanya peningkatan alokasi hibah untuk program MRT.

Target Output 2025, antara lain:



PERHUBUNGAN

- Lanjutan pembangunan jalur MRT Koridor Utara-Selatan Fase 2A sepanjang ± 5,8 km.
- Pembangunan jalur MRT Jakarta koridor Timur Barat Fase 1 Tahap 1 sepanjang ± 1,77 km.



PERTANIAN

- Pembangunan jalan usaha tani sepanjang 102 km, terasering lahan seluas 15 ha, bantuan saprodi untuk 3.357 ha, dan pengadaan alsintan sebanyak 2.045 unit

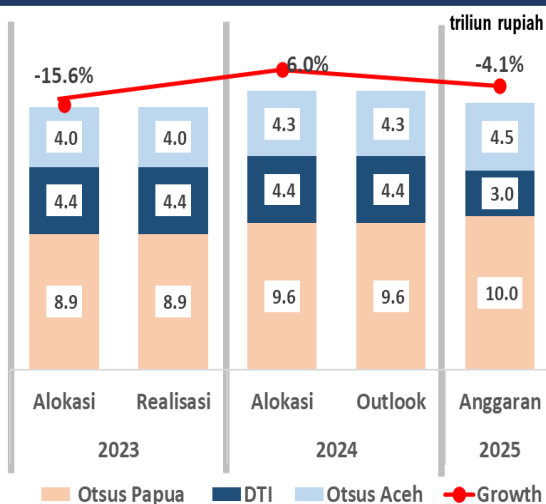


LINGKUNGAN HIDUP

- Mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan lahan sebesar 3 juta ton Co2eq; dan
- Pengelolaan area hutan dan lahan secara berkelanjutan pada 4 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

PERKEMBANGAN DAN KEBIJAKAN DANA OTSUS & DTI TA 2025

PERKEMBANGAN OTONOMI KHUSUS TA 2023-2025



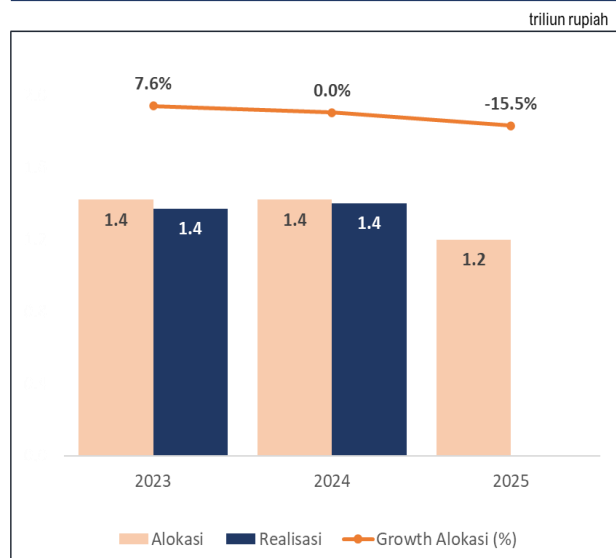
- Pagu Dana Otsus (Aceh dan Papua) TA 2025 meningkat akibat peningkatan pagu DAU.
- Pagu DTI TA 2025 lebih rendah karena strategi pelaksanaan prioritas nasional di daerah serta untuk mendukung TKD *mandatory* diantaranya untuk penggajian P3K.

KEBIJAKAN OTONOMI KHUSUS TA 2025

- Mendorong prioritas penggunaan Dana Otsus, untuk:
 - Penurunan kemiskinan:** perbaikan kualitas pendidikan, kesehatan, ekonomi, penyediaan air bersih, sanitasi lingkungan.
 - Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah:** penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan perhubungan.
 - Mendukung capaian rencana induk** percepatan pembangunan papua untuk mewujudkan papua sehat, papua cerdas, dan papua produktif.
- Meningkatkan efektivitas penggunaan Dana Otsus** melalui sinergi pendanaan APBN dan APBD guna mendukung pencapaian target pembangunan.
- Meningkatkan kualitas SDM** pengelola Dana Otsus terutama di DOB, melalui asistensi dan pembinaan yang intensif dan berkesinambungan.
- Penggunaan DTI pada DOB, diprioritaskan untuk pembangunan **infrastruktur penunjang** gedung perkantoran.

PERKEMBANGAN & KEBIJAKAN DANA KEISTIMEWAAN DIY TA 2025

PERKEMBANGAN DAIS TA 2023-2025



- Pagu alokasi Dana keistimewaan 2025 lebih rendah karena strategi pelaksanaan prioritas nasional di daerah oleh K/L serta untuk mendukung TKD *mandatory* diantaranya untuk penggajian P3K.

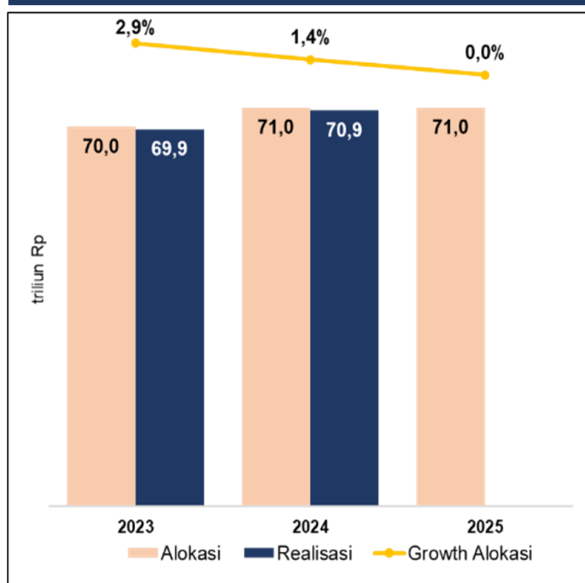
KEBIJAKAN DANA KEISTIMEWAAN DIY TA 2025

- Mengarahkan **penggunaan** Dana Keistimewaan fokus untuk:
 - penurunan tingkat kemiskinan;
 - pemberdayaan masyarakat dan UMKM,
 - peningkatan penyediaan layanan dasar publik,
 - serta mengurangi belanja birokrasi penunjang, administrasi dan pengawasan;
- Meningkatkan **sinergi** dengan Belanja K/L untuk pencapaian **prioritas nasional** dengan mempertimbangkan prioritas daerah.
- Meningkatkan **tata kelola pemanfaatan** Dana Keistimewaan DIY yang inovatif, partisipatif, dan transparan **melalui** pengembangan **sistem informasi yang terintegrasi** secara berkelanjutan.

PERKEMBANGAN DAN KEBIJAKAN DANA DESA TA 2025

Mengarahkan fokus penggunaan Dana Desa yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat

PERKEMBANGAN DANA DESA TA 2023-2025



*) Outlook realisasi tahun 2024.

- Pagu Dana Desa tahun 2025 naik sebesar 0,2% dari outlook realisasi tahun 2024.

KEBIJAKAN DANA DESA TA 2025

- Mendorong peningkatan kemandirian desa & kualitas tata kelola Dana Desa melalui:
 - penyaluran Dana Desa berdasarkan fokus penggunaan yang ditetapkan,
 - penyaluran Dana Desa secara langsung dari RKUN ke RKD,
 - pemberian *reward* berupa alokasi kinerja dan insentif desa,
 - pemberian *reward* penyaluran Dana Desa lebih besar pada tahap I kepada desa berstatus Mandiri, dan
 - penerapan sanksi terhadap desa yang menyalahgunakan keuangan desa dan tidak mampu menyerap Dana Desa secara optimal.
- Mengarahkan fokus penggunaan Dana Desa melalui:
 - penanganan kemiskinan ekstrem melalui BLT Desa paling tinggi 15%,
 - penguatan desa untuk aksi mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim,
 - promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan desa termasuk stunting,
 - dukungan program ketahanan pangan,
 - pengembangan potensi dan keunggulan desa,
 - percepatan implementasi desa digital,
 - pembangunan berbasis padat karya tunai dan penggunaan bahan baku lokal,
 - operasional pemerintah desa paling tinggi 3%, dan/atau
 - program sektor prioritas lainnya di desa.
- Meningkatkan kualitas data keuangan desa berbasis elektronik terintegrasi dalam rangka memperkuat monitoring dan evaluasi.

FORMULA PENGALOKASIAN DANA DESA TA 2025

Pagu Rp71 T dialokasikan kepada 75.259 desa di 434 Kab/Kota

Yang terdiri atas:

A

Sebesar **Rp69 T** pengalokasiannya dihitung sebelum tahun anggaran berjalan berdasarkan formula = AD + AA + AK + AF



Alokasi Dasar (AD) sebesar 65% dibagi secara merata kepada setiap desa berdasarkan klaster jumlah penduduk



Alokasi Afirmasi (AA) sebesar 1% dibagi secara proporsional kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin terbanyak.

Dalam kurun 2022-2024, rata-rata penerima AA untuk Desa Tertinggal sebesar Rp106,6 juta/desa. Untuk Desa Sangat Tertinggal Rp167,2 juta/desa.



Alokasi Kinerja (AK) sebesar 4% (empat persen) dibagi kepada desa dengan kinerja terbaik. Penilaian AK dilakukan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota

Dalam kurun 2022-2024, rata-rata penerima AK sebesar Rp235,6 juta/desa.



Alokasi Formula (AF) sebesar 30% dibagi berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa



B

Sebesar **Rp2 T** dialokasikan dan disalurkan sebagai Insentif Desa pada tahun anggaran berjalan berdasarkan kinerja desa atas peningkatan tata kelola keuangan desa dan penghargaan yang diberikan oleh kementerian/lembaga



Pagu sebesar Rp2T dialokasikan kepada desa berdasarkan pemenuhan Kriteria Utama dan capaian Kriteria Kinerja. **Kriteria Kinerja meliputi:**

1. Kinerja Pemerintahan Desa, yang terdiri dari:
 - o Kinerja Keuangan dan Pembangunan Desa
 - o Tata Kelola Keuangan dan Akuntabilitas Keuangan Desa
2. Penghargaan Kementerian/lembaga

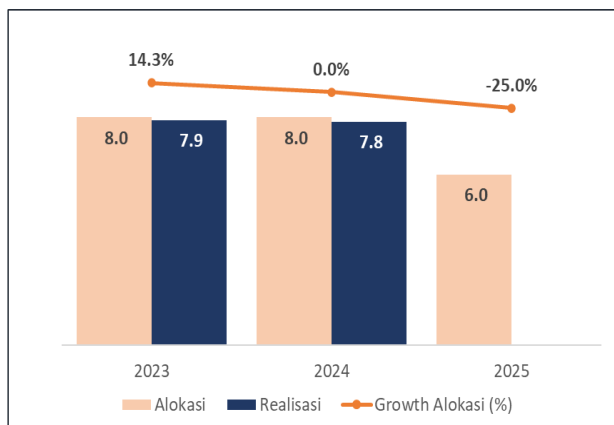


Penyaluran dilakukan terpisah dengan penyaluran pagu berdasarkan formula regular.

PERKEMBANGAN DAN KEBIJAKAN INSENTIF FISKAL TA 2025

Mendorong kinerja Pemerintah Daerah dalam meningkatkan tata Kelola APBD

PERKEMBANGAN DANA INSENTIF FISKAL TA 2023-2025



- ❑ Outlook penyaluran insentif fiskal 2024 sebesar Rp7,8 triliun, dimana terdapat beberapa daerah yang tidak dapat disalurkan karena tidak memenuhi syarat salur
- ❑ Pagu Insentif Fiskal tahun 2025 lebih rendah karena kinerja daerah juga diperhitungkan di alokasi DAU dan DBH serta untuk mendukung TKD *mandatory* diantaranya untuk penggajian P3K.

KEBIJAKAN INSENTIF FISKAL TA 2025

1. Pengalokasian berdasarkan **kinerja tahun anggaran sebelumnya** dan **tahun anggaran berjalan**;
2. Indikator kinerja tahun sebelumnya meliputi **pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar**;
3. Indikator kinerja tahun berjalan meliputi dukungan **pencapaian target prioritas nasional**
4. Mendorong peran Insentif Fiskal untuk meningkatkan **kemandirian daerah**, antara lain melalui peningkatan pajak daerah, retribusi daerah, dan/atau sumber pembiayaan lain.
5. Melanjutkan **pemberian Insentif Fiskal kepada daerah tertinggal** dengan tetap memperhatikan kinerja daerah tertinggal.

FORMULA PENGALOKASIAN INSENTIF FISKAL TA 2025

Pagu Rp6,0 T dialokasikan Atas Kinerja Tahun Sebelumnya dan Tahun Berjalan

Yang terdiri atas:

A

Sebesar Rp4,0 T pengalokasiannya didasarkan atas kinerja pemda tahun sebelumnya



Dilakukan klusterisasi daerah dalam upaya untuk meningkatkan keadilan dalam penilaian. Klusterisasi menggunakan peta kapasitas fiskal dan klaster daerah tertinggal



Dilakukan filterisasi berupa pemenuhan atas opini BPK atas LKPD dan penetapan APBD tepat waktu, dalam upaya untuk peningkatan tata Kelola keuangan daerah



Alokasi diberikan kepada daerah dengan peringkat terbaik untuk provinsi, kabupaten, dan kota untuk tiap kategori kinerja di setiap klaster.



B

Sebesar Rp2,0 T pengalokasiannya didasarkan atas kinerja pemerintah daerah tahun berjalan



Kinerja pemda yang digunakan diarahkan untuk dapat mendukung fokus kebijakan nasional di tahun berjalan, antara lain: penurunan prevalensi stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem, dan/atau percepatan belanja daerah.



Pengalokasian insentif fiskal dilakukan dalam beberapa periode atas kinerja dalam rentang waktu tertentu di tahun berjalan, dalam upaya untuk percepatan perbaikan kinerja daerah.



RINCIAN ALOKASI TRANSFER KE DAERAH TA 2025



REKAPITULASI ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
SE-PROVINSI ACEH

(dalam ribuan rupiah)

NO	PEMERINTAH DAERAH	DANA BAGI HASIL	DANA ALOKASI UMUM	DAK FISIK	DAK NONFISIK	OTSUS	DANA DESA	INSENTIF FISKAL	JUMLAH
1	PROVINSI ACEH	323.612.596	2.264.951.287	227.013.450	988.196.872	3.457.506.523	-	-	7.261.280.728
2	KAB. ACEH BARAT	103.255.675	617.451.119	67.394.388	131.514.851	45.234.436	226.338.041	-	1.191.188.510
3	KAB. ACEH BESAR	19.272.756	821.340.165	58.011.279	195.997.342	50.890.645	422.529.527	-	1.568.041.714
4	KAB. ACEH SELATAN	15.363.698	661.320.354	89.824.313	166.923.878	46.178.272	198.440.845	-	1.178.051.360
5	KAB. ACEH SINGKIL	21.028.864	480.644.727	35.676.783	113.653.514	37.140.969	93.077.401	-	781.222.258
6	KAB. ACEH TENGAH	23.227.453	646.509.665	63.554.432	155.225.977	47.855.883	215.434.104	7.198.697	1.159.006.211
7	KAB. ACEH TENGGARA	11.670.084	609.723.097	55.086.391	149.975.668	45.629.078	268.998.135	-	1.141.082.453
8	KAB. ACEH TIMUR	67.051.330	904.320.199	76.641.575	273.442.776	58.432.686	378.883.238	-	1.758.771.804
9	KAB. ACEH UTARA	61.531.825	1.042.991.734	117.332.372	391.751.274	57.578.885	614.130.396	-	2.285.316.486
10	KAB. BIREUEN	15.578.597	913.084.526	52.674.531	254.450.399	47.263.711	434.655.377	-	1.717.707.141
11	KAB. PIDIE	20.770.411	915.932.549	92.459.710	233.525.230	52.322.599	502.708.798	-	1.817.719.297
12	KAB. SIMEULUE	12.199.431	467.355.461	56.224.514	87.990.325	38.154.584	102.841.865	-	764.766.180
13	KOTA BANDA ACEH	42.160.200	603.765.164	102.235.813	123.457.856	55.719.895	78.956.127	15.527.812	1.021.822.867
14	KOTA SABANG	9.390.839	373.776.120	15.908.226	38.690.228	30.667.402	15.258.298	13.677.689	497.318.802
15	KOTA LANGSA	18.025.586	470.770.257	31.863.279	81.117.788	35.215.914	58.243.045	-	695.235.869
16	KOTA LHOKEUMAWA	20.461.450	468.844.911	6.934.508	96.956.727	35.636.650	60.814.139	7.385.226	697.033.611
17	KAB. GAYO LUES	16.308.820	472.988.687	40.580.784	78.059.789	45.117.551	105.476.181	-	758.531.812
18	KAB. ACEH BARAT DAYA	19.944.806	469.876.032	52.683.664	96.308.613	39.897.586	113.551.230	6.911.270	799.173.201
19	KAB. ACEH JAYA	19.090.326	450.574.384	72.106.257	87.081.188	42.710.023	121.697.824	-	793.260.002
20	KAB. NAGAN RAYA	71.783.058	560.446.726	51.248.679	123.248.598	42.403.402	163.530.670	-	1.012.661.133
21	KAB. ACEH TAMIANG	95.590.742	573.278.515	48.734.106	155.780.930	43.225.781	170.802.898	-	1.087.412.972
22	KAB. BENER MERIAH	12.281.760	498.122.244	66.872.025	124.894.238	39.919.827	166.731.553	6.995.436	915.817.083
23	KAB. PIDIE JAYA	11.427.379	447.774.800	38.283.999	94.765.907	37.066.109	159.206.462	-	788.524.656
24	KOTA SUBULUSSALAM	13.466.588	356.090.716	57.834.109	70.479.381	34.569.730	65.858.945	-	598.299.469
JUMLAH		1.044.494.274	16.091.883.439	1.577.179.187	4.313.489.349	4.466.338.141	4.738.165.099	57.696.130	32.289.245.619

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PROVINSI ACEH

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	7.261.280.728
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	323.612.596
1. DBH Pajak	154.083.977
a. Pajak Penghasilan	86.224.031
b. Pajak Bumi dan Bangunan	44.328.443
c. Cukai Hasil Tembakau	23.531.503
2. DBH Sumber Daya Alam	157.525.538
a. Migas	100.035.768
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	56.333.221
c. Kehutanan	987.746
d. Perikanan	-
e. Panas Bumi	168.803
3. DBH Lainnya	12.003.081
a. Perkebunan Sawit	12.003.081
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	2.264.951.287
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	1.735.433.014
2. DAU ditentukan penggunaannya	529.518.273
a. Penggajian Formasi PPPK	185.404.966
b. Pendanaan Kelurahan	-
c. Bidang Pendidikan	180.998.240
d. Bidang Kesehatan	106.721.459
e. Bidang Pekerjaan Umum	56.393.608
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	1.215.210.322
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	227.013.450
a. Pendidikan	76.340.597
b. Kesehatan	46.404.862
c. Konektivitas	23.709.529
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	-
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	29.047.372
h. Pangan Pertanian	26.119.806
i. Pangan Akuatik	25.391.284
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	988.196.872
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	349.037.719
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	624.790.466
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	5.267.216
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	7.350.811
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	200.000
f. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
g. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	1.000.000
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	150.000
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	-
E. Insentif Fiskal	-
F. Dana Otonomi Khusus	3.457.506.523

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

KAB. ACEH BARAT

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	1.191.188.510
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	103.255.675
1. DBH Pajak	22.691.949
a. Pajak Penghasilan	7.740.041
b. Pajak Bumi dan Bangunan	14.951.908
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	78.129.311
a. Migas	466.546
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	76.582.359
c. Kehutanan	18.891
d. Perikanan	1.052.090
e. Panas Bumi	9.425
3. DBH Lainnya	2.434.415
a. Perkebunan Sawit	2.434.415
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	617.451.119
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	490.641.817
2. DAU ditentukan penggunaannya	126.809.302
a. Penggajian Formasi PPPK	8.618.840
b. Pendanaan Kelurahan	-
c. Bidang Pendidikan	49.598.861
d. Bidang Kesehatan	46.101.697
e. Bidang Pekerjaan Umum	22.489.904
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	198.909.239
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	67.394.388
a. Pendidikan	596.198
b. Kesehatan	31.452.638
c. Konektivitas	22.345.941
d. Air Minum	6.184.282
e. Sanitasi	4.758.822
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	2.056.507
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	131.514.851
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	29.711.338
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	72.200.864
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	19.854.166
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	8.597.823
f. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
g. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	750.000
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	226.338.041
E. Insentif Fiskal	-
F. Dana Otonomi Khusus	45.234.436

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

KAB. ACEH BESAR

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	1.568.041.714
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	19.272.756
1. DBH Pajak	12.459.140
a. Pajak Penghasilan	8.733.788
b. Pajak Bumi dan Bangunan	3.725.352
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	5.712.881
a. Migas	466.546
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	3.114.516
c. Kehutanan	14.991
d. Perikanan	1.775.553
e. Panas Bumi	341.275
3. DBH Lainnya	1.100.735
a. Perkebunan Sawit	1.100.735
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	821.340.165
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	647.868.668
2. DAU ditentukan penggunaannya	173.471.497
a. Penggajian Formasi PPPK	18.585.101
b. Pendanaan Kelurahan	-
c. Bidang Pendidikan	64.657.726
d. Bidang Kesehatan	62.980.009
e. Bidang Pekerjaan Umum	27.248.661
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	254.008.621
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	58.011.279
a. Pendidikan	1.423.432
b. Kesehatan	33.636.879
c. Konektivitas	-
d. Air Minum	13.317.873
e. Sanitasi	5.468.329
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	4.164.766
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	195.997.342
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	55.497.111
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	98.486.374
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	29.523.861
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	11.739.996
f. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
g. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	750.000
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	422.529.527
E. Insentif Fiskal	-
F. Dana Otonomi Khusus	50.890.645

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. ACEH SELATAN

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	1.178.051.360
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	15.363.698
1. DBH Pajak	6.364.616
a. Pajak Penghasilan	3.813.241
b. Pajak Bumi dan Bangunan	2.551.375
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	7.032.474
a. Migas	466.546
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	4.981.157
c. Kehutanan	15.662
d. Perikanan	1.559.684
e. Panas Bumi	9.425
3. DBH Lainnya	1.966.608
a. Perkebunan Sawit	1.966.608
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	661.320.354
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	510.865.113
2. DAU ditentukan penggunaannya	150.455.241
a. Penggajian Formasi PPPK	2.323.138
b. Pendanaan Kelurahan	-
c. Bidang Pendidikan	61.644.189
d. Bidang Kesehatan	45.087.761
e. Bidang Pekerjaan Umum	41.400.153
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	256.748.191
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	89.824.313
a. Pendidikan	2.409.590
b. Kesehatan	8.903.951
c. Konektivitas	49.089.602
d. Air Minum	13.684.569
e. Sanitasi	3.987.941
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	3.372.660
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	8.376.000
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	166.923.878
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	39.693.256
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	89.977.602
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	30.206.154
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	7.046.866
f. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
g. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	198.440.845
E. Insentif Fiskal	-
F. Dana Otonomi Khusus	46.178.272

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

KAB. ACEH SINGKIL

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	781.222.258
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	21.028.864
1. DBH Pajak	11.756.519
a. Pajak Penghasilan	3.414.151
b. Pajak Bumi dan Bangunan	8.342.368
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	5.906.865
a. Migas	457.025
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	3.110.033
c. Kehutanan	32.049
d. Perikanan	2.298.526
e. Panas Bumi	9.232
3. DBH Lainnya	3.365.480
a. Perkebunan Sawit	3.365.480
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	480.644.727
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	339.036.624
2. DAU ditentukan penggunaannya	141.608.103
a. Penggajian Formasi PPPK	33.731.958
b. Pendanaan Kelurahan	-
c. Bidang Pendidikan	54.495.040
d. Bidang Kesehatan	32.672.793
e. Bidang Pekerjaan Umum	20.708.312
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	149.330.297
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	35.676.783
a. Pendidikan	928.060
b. Kesehatan	12.299.074
c. Konektivitas	21.402.721
d. Air Minum	1.046.928
e. Sanitasi	-
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	-
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	113.653.514
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	29.296.089
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	57.658.119
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	21.871.906
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	4.227.400
f. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
g. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	600.000
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	93.077.401
E. Insentif Fiskal	-
F. Dana Otonomi Khusus	37.140.969

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

KAB. ACEH TENGAH

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	1.159.006.211
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	23.227.453
1. DBH Pajak	7.012.585
a. Pajak Penghasilan	4.282.706
b. Pajak Bumi dan Bangunan	2.729.879
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	14.923.107
a. Migas	1.100.879
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	12.919.337
c. Kehutanan	59.854
d. Perikanan	833.805
e. Panas Bumi	9.232
3. DBH Lainnya	1.291.761
a. Perkebunan Sawit	1.291.761
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	646.509.665
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	516.590.040
2. DAU ditentukan penggunaannya	129.919.625
a. Penggajian Formasi PPPK	16.261.963
b. Pendanaan Kelurahan	-
c. Bidang Pendidikan	53.796.774
d. Bidang Kesehatan	35.475.965
e. Bidang Pekerjaan Umum	24.384.923
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	218.780.409
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	63.554.432
a. Pendidikan	2.610.284
b. Kesehatan	16.381.951
c. Konektivitas	32.608.506
d. Air Minum	5.948.674
e. Sanitasi	-
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	6.005.017
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	155.225.977
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	33.485.200
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	91.727.140
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	493.099
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	21.261.048
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	7.253.800
f. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
g. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	500.000
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	505.690
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	215.434.104
E. Insentif Fiskal	7.198.697
F. Dana Otonomi Khusus	47.855.883



DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

KAB. ACEH TENGGARA

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	1.141.082.453
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	11.670.084
1. DBH Pajak	5.256.996
a. Pajak Penghasilan	3.392.953
b. Pajak Bumi dan Bangunan	1.864.043
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	4.573.483
a. Migas	515.516
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	3.174.825
c. Kehutanan	22.541
d. Perikanan	851.176
e. Panas Bumi	9.425
3. DBH Lainnya	1.839.605
a. Perkebunan Sawit	1.839.605
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	609.723.097
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	461.705.530
2. DAU ditentukan penggunaannya	148.017.567
a. Penggajian Formasi PPPK	5.947.232
b. Pendanaan Kelurahan	-
c. Bidang Pendidikan	60.888.803
d. Bidang Kesehatan	39.088.641
e. Bidang Pekerjaan Umum	42.092.891
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	205.062.059
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	55.086.391
a. Pendidikan	1.587.656
b. Kesehatan	7.057.618
c. Konektivitas	30.117.794
d. Air Minum	10.373.474
e. Sanitasi	5.949.849
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	-
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	149.975.668
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	44.382.468
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	70.847.346
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	26.288.558
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	8.457.296
f. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
g. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	268.998.135
E. Insentif Fiskal	-
F. Dana Otonomi Khusus	45.629.078

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

KAB. ACEH TIMUR

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	1.758.771.804
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	67.051.330
1. DBH Pajak	49.245.689
a. Pajak Penghasilan	5.484.809
b. Pajak Bumi dan Bangunan	43.760.880
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	14.660.062
a. Migas	10.245.189
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	3.066.665
c. Kehutanan	21.773
d. Perikanan	1.317.010
e. Panas Bumi	9.425
3. DBH Lainnya	3.145.579
a. Perkebunan Sawit	3.145.579
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	904.320.199
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	669.449.237
2. DAU ditentukan penggunaannya	234.870.962
a. Penggajian Formasi PPPK	21.814.262
b. Pendanaan Kelurahan	-
c. Bidang Pendidikan	83.789.568
d. Bidang Kesehatan	64.255.263
e. Bidang Pekerjaan Umum	65.011.869
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	350.084.351
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	76.641.575
a. Pendidikan	1.868.345
b. Kesehatan	25.653.935
c. Konektivitas	34.679.198
d. Air Minum	14.440.097
e. Sanitasi	-
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	-
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	273.442.776
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	82.195.392
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	146.687.521
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	32.924.299
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	11.135.564
f. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
g. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	500.000
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	378.883.238
E. Insentif Fiskal	-
F. Dana Otonomi Khusus	58.432.686

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

KAB. ACEH UTARA

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	2.285.316.486
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	61.531.825
1. DBH Pajak	48.479.667
a. Pajak Penghasilan	9.858.435
b. Pajak Bumi dan Bangunan	38.621.232
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	10.360.207
a. Migas	6.289.507
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	3.004.080
c. Kehutanan	13.565
d. Perikanan	1.043.823
e. Panas Bumi	9.232
3. DBH Lainnya	2.691.951
a. Perkebunan Sawit	2.691.951
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	1.042.991.734
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	764.573.762
2. DAU ditentukan penggunaannya	278.417.972
a. Penggajian Formasi PPPK	20.629.462
b. Pendanaan Kelurahan	-
c. Bidang Pendidikan	129.514.850
d. Bidang Kesehatan	74.818.356
e. Bidang Pekerjaan Umum	53.455.304
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	509.083.646
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	117.332.372
a. Pendidikan	4.608.035
b. Kesehatan	14.295.253
c. Konektivitas	64.403.289
d. Air Minum	15.703.920
e. Sanitasi	-
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	5.945.875
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	12.376.000
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	391.751.274
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	112.751.348
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	219.468.152
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	42.982.472
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	15.585.421
f. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
g. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	563.221
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	614.130.396
E. Insentif Fiskal	-
F. Dana Otonomi Khusus	57.578.885

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

KAB. BIREUEN

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	1.717.707.141
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	15.578.597
1. DBH Pajak	8.648.492
a. Pajak Penghasilan	5.836.866
b. Pajak Bumi dan Bangunan	2.811.626
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	5.288.057
a. Migas	1.071.208
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	3.066.802
c. Kehutanan	16.831
d. Perikanan	1.123.791
e. Panas Bumi	9.425
3. DBH Lainnya	1.642.048
a. Perkebunan Sawit	1.642.048
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	913.084.526
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	740.935.986
2. DAU ditentukan penggunaannya	172.148.540
a. Penggajian Formasi PPPK	14.310.528
b. Pendanaan Kelurahan	-
c. Bidang Pendidikan	78.874.967
d. Bidang Kesehatan	52.068.285
e. Bidang Pekerjaan Umum	26.894.760
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	307.124.930
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	52.674.531
a. Pendidikan	2.309.634
b. Kesehatan	15.722.338
c. Konektivitas	20.771.000
d. Air Minum	6.144.480
e. Sanitasi	-
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	4.753.910
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	2.973.169
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	254.450.399
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	73.698.083
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	143.492.358
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	25.259.298
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	11.000.000
f. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
g. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	600.000
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	434.655.377
E. Insentif Fiskal	-
F. Dana Otonomi Khusus	47.263.711

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

KAB. PIDIE

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	1.817.719.297
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	20.770.411
1. DBH Pajak	8.080.879
a. Pajak Penghasilan	5.974.673
b. Pajak Bumi dan Bangunan	2.106.206
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	11.519.544
a. Migas	466.546
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	9.910.430
c. Kehutanan	17.383
d. Perikanan	1.073.560
e. Panas Bumi	51.625
3. DBH Lainnya	1.169.988
a. Perkebunan Sawit	1.169.988
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	915.932.549
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	731.574.150
2. DAU ditentukan penggunaannya	184.358.399
a. Penggajian Formasi PPPK	2.369.600
b. Pendanaan Kelurahan	-
c. Bidang Pendidikan	72.301.631
d. Bidang Kesehatan	72.910.245
e. Bidang Pekerjaan Umum	36.776.923
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	325.984.940
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	92.459.710
a. Pendidikan	1.436.898
b. Kesehatan	6.099.751
c. Konektivitas	53.888.744
d. Air Minum	14.241.073
e. Sanitasi	-
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	4.830.211
h. Pangan Pertanian	11.963.033
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	233.525.230
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	53.938.159
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	119.763.624
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	36.670.205
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	15.904.527
f. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
g. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	500.000
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	6.748.715
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	502.708.798
E. Insentif Fiskal	-
F. Dana Otonomi Khusus	52.322.599

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

KAB. SIMEULUE

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	764.766.180
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	12.199.431
1. DBH Pajak	4.565.452
a. Pajak Penghasilan	2.867.559
b. Pajak Bumi dan Bangunan	1.697.893
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	6.383.958
a. Migas	466.546
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	3.066.665
c. Kehutanan	21.363
d. Perikanan	2.819.959
e. Panas Bumi	9.425
3. DBH Lainnya	1.250.021
a. Perkebunan Sawit	1.250.021
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	467.355.461
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	353.133.785
2. DAU ditentukan penggunaannya	114.221.676
a. Penggajian Formasi PPPK	6.760.330
b. Pendanaan Kelurahan	-
c. Bidang Pendidikan	42.916.306
d. Bidang Kesehatan	30.610.054
e. Bidang Pekerjaan Umum	33.934.986
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	144.214.839
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	56.224.514
a. Pendidikan	773.868
b. Kesehatan	12.617.211
c. Konektivitas	25.464.033
d. Air Minum	8.554.223
e. Sanitasi	4.932.873
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	3.882.306
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	87.990.325
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	18.256.440
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	47.756.285
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	17.477.600
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	4.500.000
f. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
g. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	102.841.865
E. Insentif Fiskal	-
F. Dana Otonomi Khusus	38.154.584

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KOTA BANDA ACEH

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	1.021.822.867
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	42.160.200
1. DBH Pajak	37.250.501
a. Pajak Penghasilan	35.501.411
b. Pajak Bumi dan Bangunan	1.749.090
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	4.401.320
a. Migas	457.025
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	3.004.080
c. Kehutanan	4.932
d. Perikanan	884.711
e. Panas Bumi	50.572
3. DBH Lainnya	508.379
a. Perkebunan Sawit	508.379
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	603.765.164
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	504.897.497
2. DAU ditentukan penggunaannya	98.867.667
a. Penggajian Formasi PPPK	22.710.993
b. Pendanaan Kelurahan	-
c. Bidang Pendidikan	41.686.854
d. Bidang Kesehatan	34.469.820
e. Bidang Pekerjaan Umum	-
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	225.693.669
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	102.235.813
a. Pendidikan	1.093.791
b. Kesehatan	60.119.148
c. Konektivitas	30.488.237
d. Air Minum	8.031.929
e. Sanitasi	2.502.708
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	-
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	123.457.856
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	46.461.250
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	62.100.203
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	11.170.713
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	2.720.000
f. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
g. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	500.000
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	505.690
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	78.956.127
E. Insentif Fiskal	15.527.812
F. Dana Otonomi Khusus	55.719.895

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

KOTA SABANG

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	497.318.802
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	9.390.839
1. DBH Pajak	4.540.201
a. Pajak Penghasilan	2.928.483
b. Pajak Bumi dan Bangunan	1.611.718
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	4.850.638
a. Migas	466.546
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	3.066.665
c. Kehutanan	4.770
d. Perikanan	1.303.232
e. Panas Bumi	9.425
3. DBH Lainnya	-
a. Perkebunan Sawit	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	373.726.120
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	330.994.647
2. DAU ditentukan penggunaannya	42.731.473
a. Penggajian Formasi PPPK	4.646.275
b. Pendanaan Kelurahan	-
c. Bidang Pendidikan	11.208.933
d. Bidang Kesehatan	20.126.026
e. Bidang Pekerjaan Umum	6.750.239
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	54.598.454
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	15.908.226
a. Pendidikan	364.063
b. Kesehatan	11.113.500
c. Konektivitas	-
d. Air Minum	628.157
e. Sanitasi	3.802.506
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	-
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	38.690.228
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	7.063.190
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	18.814.817
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	7.626.337
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	1.073.694
f. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
g. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	500.000
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	505.690
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	3.106.500
D. Dana Desa	15.258.298
E. Insentif Fiskal	13.677.689
F. Dana Otonomi Khusus	30.667.402

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KOTA LANGSA

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	695.235.869
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	18.025.586
1. DBH Pajak	9.818.747
a. Pajak Penghasilan	7.287.329
b. Pajak Bumi dan Bangunan	2.531.418
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	5.628.932
a. Migas	1.649.552
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	3.066.665
c. Kehutanan	5.216
d. Perikanan	898.074
e. Panas Bumi	9.425
3. DBH Lainnya	2.577.907
a. Perkebunan Sawit	2.577.907
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	470.770.257
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	379.773.854
2. DAU ditentukan penggunaannya	90.996.403
a. Penggajian Formasi PPPK	30.270.483
b. Pendanaan Kelurahan	-
c. Bidang Pendidikan	26.078.672
d. Bidang Kesehatan	26.023.825
e. Bidang Pekerjaan Umum	8.623.423
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	112.981.067
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	31.863.279
a. Pendidikan	642.530
b. Kesehatan	17.708.377
c. Konektivitas	5.124.501
d. Air Minum	4.350.391
e. Sanitasi	4.037.480
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	-
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	81.117.788
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	27.139.300
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	43.944.677
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	7.470.961
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	2.162.190
f. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
g. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	58.243.045
E. Insentif Fiskal	-
F. Dana Otonomi Khusus	35.215.914



**DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KOTA LHOKEUMAWE**

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	697.033.611
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	20.461.450
1. DBH Pajak	13.698.790
a. Pajak Penghasilan	11.607.509
b. Pajak Bumi dan Bangunan	2.091.281
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	4.977.962
a. Migas	1.049.346
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	3.004.080
c. Kehutanan	4.673
d. Perikanan	910.631
e. Panas Bumi	9.232
3. DBH Lainnya	1.784.698
a. Perkebunan Sawit	1.784.698
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	468.844.911
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	348.271.906
2. DAU ditentukan penggunaannya	120.573.005
a. Penggajian Formasi PPPK	49.566.464
b. Pendanaan Kelurahan	-
c. Bidang Pendidikan	29.899.145
d. Bidang Kesehatan	35.585.843
e. Bidang Pekerjaan Umum	5.521.553
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	103.891.235
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	6.934.508
a. Pendidikan	914.859
b. Kesehatan	575.623
c. Konektivitas	-
d. Air Minum	5.444.026
e. Sanitasi	-
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	-
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	96.956.727
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	30.391.380
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	51.661.750
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	598.407
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	11.903.467
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	1.896.033
f. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
g. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	505.690
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	60.814.139
E. Insentif Fiskal	7.385.226
F. Dana Otonomi Khusus	35.636.650

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

KAB. GAYO LUES

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	758.531.812
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	16.308.820
1. DBH Pajak	4.617.432
a. Pajak Penghasilan	2.647.600
b. Pajak Bumi dan Bangunan	1.969.832
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	9.825.236
a. Migas	1.698.522
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	7.246.532
c. Kehutanan	19.581
d. Perikanan	851.176
e. Panas Bumi	9.425
3. DBH Lainnya	1.866.152
a. Perkebunan Sawit	1.866.152
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	472.988.687
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	327.661.913
2. DAU ditentukan penggunaannya	145.326.774
a. Penggajian Formasi PPPK	13.520.661
b. Pendanaan Kelurahan	-
c. Bidang Pendidikan	38.009.529
d. Bidang Kesehatan	27.999.084
e. Bidang Pekerjaan Umum	65.797.500
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	118.640.573
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	40.580.784
a. Pendidikan	751.572
b. Kesehatan	1.494.932
c. Konektivitas	31.075.935
d. Air Minum	6.157.416
e. Sanitasi	-
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	1.100.929
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	78.059.789
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	19.066.555
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	38.239.564
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	15.333.495
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	4.920.175
f. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
g. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	500.000
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	105.476.181
E. Insentif Fiskal	-
F. Dana Otonomi Khusus	45.117.551



DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

KAB. ACEH BARAT DAYA

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	799.173.201
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	19.944.806
1. DBH Pajak	6.424.880
a. Pajak Penghasilan	3.535.193
b. Pajak Bumi dan Bangunan	2.889.687
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	11.511.759
a. Migas	466.546
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	9.995.879
c. Kehutanan	6.429
d. Perikanan	1.033.480
e. Panas Bumi	9.425
3. DBH Lainnya	2.008.167
a. Perkebunan Sawit	2.008.167
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	469.876.032
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	359.661.174
2. DAU ditentukan penggunaannya	110.214.858
a. Penggajian Formasi PPPK	3.949.334
b. Pendanaan Kelurahan	-
c. Bidang Pendidikan	40.721.583
d. Bidang Kesehatan	31.576.723
e. Bidang Pekerjaan Umum	33.967.218
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	148.992.277
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	52.683.664
a. Pendidikan	1.442.571
b. Kesehatan	25.777.837
c. Konektivitas	21.891.000
d. Air Minum	3.572.256
e. Sanitasi	-
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	-
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	96.308.613
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	23.474.240
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	52.280.220
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	15.941.393
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	4.212.100
f. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
g. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	113.551.230
E. Insentif Fiskal	6.911.270
F. Dana Otonomi Khusus	39.897.586

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

KAB. ACEH JAYA

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	793.260.002
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	19.090.326
1. DBH Pajak	4.981.131
a. Pajak Penghasilan	2.841.550
b. Pajak Bumi dan Bangunan	2.139.581
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	11.879.588
a. Migas	466.546
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	9.881.046
c. Kehutanan	56.003
d. Perikanan	1.424.368
e. Panas Bumi	51.625
3. DBH Lainnya	2.229.607
a. Perkebunan Sawit	2.229.607
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	450.574.384
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	348.723.199
2. DAU ditentukan penggunaannya	101.851.185
a. Penggajian Formasi PPPK	20.420.380
b. Pendanaan Kelurahan	-
c. Bidang Pendidikan	26.668.963
d. Bidang Kesehatan	27.302.063
e. Bidang Pekerjaan Umum	27.459.779
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	159.187.445
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	72.106.257
a. Pendidikan	1.636.573
b. Kesehatan	21.867.835
c. Konektivitas	31.646.825
d. Air Minum	10.265.331
e. Sanitasi	4.790.816
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	1.898.877
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	87.081.188
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	19.849.735
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	47.563.122
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	14.767.585
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	4.000.086
f. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
g. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	500.000
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	121.697.824
E. Insentif Fiskal	-
F. Dana Otonomi Khusus	42.710.023



DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

KAB. NAGAN RAYA

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	1.012.661.133
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	71.783.058
1. DBH Pajak	22.001.506
a. Pajak Penghasilan	6.119.674
b. Pajak Bumi dan Bangunan	15.881.832
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	45.502.900
a. Migas	466.546
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	43.871.262
c. Kehutanan	13.129
d. Perikanan	1.142.538
e. Panas Bumi	9.425
3. DBH Lainnya	4.278.652
a. Perkebunan Sawit	4.278.652
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	560.446.726
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	443.481.535
2. DAU ditentukan penggunaannya	116.965.191
a. Penggajian Formasi PPPK	4.181.648
b. Pendanaan Kelurahan	-
c. Bidang Pendidikan	46.575.845
d. Bidang Kesehatan	37.484.208
e. Bidang Pekerjaan Umum	28.723.490
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	174.497.277
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	51.248.679
a. Pendidikan	1.029.655
b. Kesehatan	4.618.428
c. Konektivitas	29.756.839
d. Air Minum	12.046.392
e. Sanitasi	-
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	3.797.365
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	123.248.598
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	29.229.012
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	60.823.758
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	25.240.120
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	6.805.048
f. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
g. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	750.000
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	163.530.670
E. Insentif Fiskal	-
F. Dana Otonomi Khusus	42.403.402

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

KAB. ACEH TAMIANG

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	1.087.412.972
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	95.590.742
1. DBH Pajak	82.451.908
a. Pajak Penghasilan	5.578.110
b. Pajak Bumi dan Bangunan	76.873.798
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	9.791.924
a. Migas	5.633.580
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	3.085.464
c. Kehutanan	14.706
d. Perikanan	1.048.749
e. Panas Bumi	9.425
3. DBH Lainnya	3.346.910
a. Perkebunan Sawit	3.346.910
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	573.278.515
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	449.922.896
2. DAU ditentukan penggunaannya	123.355.619
a. Penggajian Formasi PPPK	11.964.159
b. Pendanaan Kelurahan	-
c. Bidang Pendidikan	50.704.385
d. Bidang Kesehatan	31.519.446
e. Bidang Pekerjaan Umum	29.167.629
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	204.515.036
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	48.734.106
a. Pendidikan	952.268
b. Kesehatan	2.795.464
c. Konektivitas	40.045.080
d. Air Minum	834.527
e. Sanitasi	-
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	4.106.767
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	155.780.930
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	44.276.450
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	86.072.761
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	18.050.141
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	6.531.578
f. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
g. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	850.000
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	170.802.898
E. Insentif Fiskal	-
F. Dana Otonomi Khusus	43.225.781

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

KAB. BENER MERIAH

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	915.817.083
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	12.281.760
1. DBH Pajak	5.131.121
a. Pajak Penghasilan	3.090.982
b. Pajak Bumi dan Bangunan	2.040.139
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	5.732.011
a. Migas	1.728.477
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	3.066.665
c. Kehutanan	76.268
d. Perikanan	851.176
e. Panas Bumi	9.425
3. DBH Lainnya	1.418.628
a. Perkebunan Sawit	1.418.628
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	498.122.244
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	339.506.126
2. DAU ditentukan penggunaannya	158.616.118
a. Penggajian Formasi PPPK	38.861.446
b. Pendanaan Kelurahan	-
c. Bidang Pendidikan	40.177.245
d. Bidang Kesehatan	30.268.821
e. Bidang Pekerjaan Umum	49.308.606
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	191.766.263
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	66.872.025
a. Pendidikan	1.023.866
b. Kesehatan	19.674.056
c. Konektivitas	31.217.200
d. Air Minum	7.052.283
e. Sanitasi	4.058.545
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	2.117.927
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	1.728.148
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	124.894.238
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	30.435.903
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	68.880.517
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	18.740.728
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	6.331.400
f. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
g. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	505.690
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	166.731.553
E. Insentif Fiskal	6.995.436
F. Dana Otonomi Khusus	39.919.827

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

KAB. PIDIE JAYA

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	788.524.656
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	11.427.379
1. DBH Pajak	5.166.127
a. Pajak Penghasilan	3.420.953
b. Pajak Bumi dan Bangunan	1.745.174
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	4.510.793
a. Migas	466.546
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	3.066.687
c. Kehutanan	4.779
d. Perikanan	963.356
e. Panas Bumi	9.425
3. DBH Lainnya	1.750.459
a. Perkebunan Sawit	1.750.459
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	447.774.800
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	351.368.951
2. DAU ditentukan penggunaannya	96.405.849
a. Penggajian Formasi PPPK	3.178.052
b. Pendanaan Kelurahan	-
c. Bidang Pendidikan	35.812.541
d. Bidang Kesehatan	33.721.224
e. Bidang Pekerjaan Umum	23.694.032
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	133.049.906
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	38.283.999
a. Pendidikan	1.211.615
b. Kesehatan	8.180.941
c. Konektivitas	20.901.131
d. Air Minum	7.990.312
e. Sanitasi	-
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	-
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	94.765.907
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	21.797.799
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	51.375.930
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	15.175.053
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	5.917.125
f. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
g. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	500.000
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	159.206.462
E. Insentif Fiskal	-
F. Dana Otonomi Khusus	37.066.109

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KOTA SUBULUSSALAM

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	598.299.469
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	13.466.588
1. DBH Pajak	6.614.574
a. Pajak Penghasilan	3.199.833
b. Pajak Bumi dan Bangunan	3.414.741
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	4.539.827
a. Migas	466.546
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	3.181.809
c. Kehutanan	30.871
d. Perikanan	851.176
e. Panas Bumi	9.425
3. DBH Lainnya	2.312.187
a. Perkebunan Sawit	2.312.187
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	356.090.716
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	243.570.835
2. DAU ditentukan penggunaannya	112.519.881
a. Penggajian Formasi PPPK	7.434.040
b. Pendanaan Kelurahan	-
c. Bidang Pendidikan	53.303.758
d. Bidang Kesehatan	22.199.906
e. Bidang Pekerjaan Umum	29.582.177
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	128.313.490
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	57.834.109
a. Pendidikan	200.000
b. Kesehatan	21.804.077
c. Konektivitas	30.194.006
d. Air Minum	1.980.413
e. Sanitasi	3.655.613
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	-
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	70.479.381
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	21.939.755
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	35.657.095
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	10.382.537
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	2.499.994
f. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
g. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	65.858.945
E. Insentif Fiskal	-
F. Dana Otonomi Khusus	34.569.730

TIM PENYUSUN

BUKU ALOKASI DAN RANGKUMAN KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH TA 2025

PEMBINA	:	Luky Alfirman	Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
PENGARAH	:	1. Ludiro 2. Sandy Firdaus 3. Purwanto 4. Jaka Sucipta 5. Lydia Kurniawati Christyana 6. Adriyanto 7. Agung Widiadi	Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Direktur Dana Transfer Umum Direktur Dana Transfer Khusus Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah Direktur Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer
KETUA	:	Iwan Richard Butarbutar	Ketua Tim Reguler Penyaluran Dana Transfer
ANGGOTA	:	Kindy Rinaldy Syahrir, Mauliate Harnalyes Silitonga, Yuni Ariani, Bondan Widyatmoko, Aan Prianto, Ricka Yunita Prasetya, Tatang, Endah Pusparini, Rini Anjar Sari, Rahmatullah Priyo Kusuma, Ryan Andhika Wahyu Putra, Honiar Arfianto	
KONTRIBUTOR DATA	:	1. Tim Reguler Dana Alokasi Umum 2. Tim Reguler Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 3. Tim Reguler Dana Bagi Hasil Non Sumber Daya Alam 4. Tim Reguler Kebijakan dan Evaluasi Dana Transfer Umum 5. Tim Reguler Dana Alokasi Khusus Fisik Sektor Pengembangan Manusia dan Kebudayaan 6. Tim Reguler Dana Alokasi Khusus Fisik Sektor Pembangunan Perekonomian dan Kemaritiman 7. Tim Reguler Dana Alokasi Khusus Nonfisik 8. Tim Reguler Hibah Daerah 9. Tim Reguler Kebijakan dan Evaluasi Dana Transfer Khusus 10. Tim Reguler Pengelolaan Dana Desa 11. Tim Reguler Dana Otonomi Khusus 12. Tim Reguler Insentif Fiskal dan Keistimewaan 13. Tim Reguler Kebijakan dan Evaluasi Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan	



DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN

TERIMA KASIH

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan,
Kementerian Keuangan

Gedung Radius Prawiro, Jl. Dr. Wahidin Raya No.1
Jakarta-10710



2025

BUKU ALOKASI DAN RANGKUMAN KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025



**Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia**

Gedung Radius Prawiro, Jalan Dr. Wahidin No. 1
Jakarta – 10710

www.djpk.kemenkeu.go.id

